



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN, DAN RATU BOKO
(PERSERO)

UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HETTY HERAWATI K
2. Jabatan : DIREKTUR PEMASARAN DAN PELAYANAN
3. NHK : 647471

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 20.300.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 436 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 8.200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 509 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 9.200.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 582 m2/150 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 1.700.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 32.56 m2/32.56 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 1.415.575.250**

1. MOTOR, HARLEY DAVIDSON FLHX - STREET GLIDE Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. MOBIL, TOYOTA ALPHARD S 2.4 Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. MOBIL, MITSUBISHI EXPANDER ULTIMATE Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
4. MOTOR, TRIUMPH THRUXTON Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
5. MOBIL, MERCEDES 300 E Tahun 1990, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
6. MOBIL, MINI MINI COOPER S 1.6 A/T Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 410.000.000
7. MOTOR, HONDA HONDA BEAT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.



15.575.250		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	370.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	317.048.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.303.219.463
F. HARTA LAINNYA	Rp.	749.060.301
Sub Total	Rp.	25.454.903.014
III. HUTANG	Rp.	740.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	24.714.903.014

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.